

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menyadari pentingnya akan kebutuhan dari pendidikan, pada tahun 1990 diadakan konferensi internasional oleh PBB yang membahas tentang pendidikan dasar bagi semua anak (*Education For All*). Konferensi ini membahas tentang landasan untuk program pendidikan yang memastikan bahwa setiap orang dengan berbagai macam latar belakang sosial, ekonomi atau kondisi fisik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Pentingnya pendidikan untuk semua, yang merupakan inisiatif yang digagas oleh UNESCO, mencakup aspek pendidikan bagi anak-anak yang memiliki berkebutuhan khusus. Hal ini menegaskan prinsip bahwa anak berkebutuhan khusus harus diberikan kesempatan yang setara dengan anak-anak pada umumnya untuk memperoleh akses pendidikan. Konferensi Salamanca menyatakan bahwa jika negara-negara yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki sekolah khusus sebaiknya memusatkan upaya mereka pada pengembangan sekolah inklusif dan layanan khusus yang diperlukan untuk memungkinkan melayani sebagian besar anak berkebutuhan khusus hal utama yang perlu diperhatikan adalah penyediaan pelatihan guru dalam pendidikan kebutuhan khusus dan pembentukan pusat sumber yang dilengkapi dengan guru dan peralatan yang memadai.

Indonesia sedang berusaha untuk menjadi negara yang sedang menuju inklusif artinya melibatkan semua orang tanpa memandang perbedaan. Perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia dapat dilihat dari Deklarasi nasional di Bandung pada tahun 2004 yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif, kemudian pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukittinggi yang menghasilkan rekomendasi Bukittinggi. Hasil dari kedua deklarasi ini adalah pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia yang menuju implementasi layanan pendidikan inklusif agar anak-anak memperoleh pendidikan yang layak termasuk anak berkebutuhan khusus.

Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki potensi unik yang perlu

ditemukan dan diperkuat melalui pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah Kota Tangerang mengimplementasikan program pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus melalui penyediaan fasilitas Sekolah Luar Biasa (SLB) atau Sekolah Khusus (SKh). Namun, realita yang ditemukan di wilayah Kota Tangerang hanya terdapat 16 SLB dan SKh yang tersedia. Keterbatasan jumlah ini memberikan tantangan dalam aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah tersebut. Berdasarkan data dari BPS Kota Tangerang memiliki jumlah penyandang disabilitas sebanyak 2.631, untuk itu pemerintah Kota Tangerang berupaya mengakomodasi kebutuhan ini dengan mengembangkan layanan pendidikan inklusif. Berdasarkan data pokok pendidikan tahun 2022 terdapat 40.928 sekolah yang sudah melaksanakan pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif ini bertujuan untuk mengakomodasi anak berkebutuhan khusus yang belum dijangkau dalam bidang pendidikan umum, kebijakan ini mewajibkan semua peserta didik diterima di sekolah penyelenggara inklusif. Pendidikan inklusif didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Kemudian pemerintah Kota Tangerang mengeluarkan peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 73 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Tangerang. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Tangerang menunjuk 79 sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif diantaranya 53 Sekolah Dasar (SD), 13 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 13 Taman Kanak-Kanak (TK). Dinas Pendidikan Kota Tangerang membagi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) menjadi 3 wilayah yaitu, timur, tengah dan barat hal ini menjadikan SKh YKDW 1, SKh YKDW 2, dan SKh YKDW 3 menjadi pusat sumber. Dari data tersebut membuktikan bahwa kurang lebih hanya 13% dari 420 jumlah Sekolah Dasar di daerah Kota Tangerang baru menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, pelaksanaan pendidikan inklusif dapat dilihat dari Sekolah Dasar (SD) yang telah menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Sekolah-sekolah di Kota Tangerang

menerapkan pendidikan inklusif dengan menerapkan kelas reguler dengan *pull out* yang artinya PDBK belajar bersama anak reguler di kelasnya, tetapi dalam waktu tertentu ditarik ke kelas khusus untuk melakukan bimbingan dengan GPK. Kelas inklusif ini dirancang untuk mengakomodasi keragaman dalam belajar dan perilaku yang dimiliki oleh PDBK.

Namun, dalam implementasi pendidikan inklusif di Indonesia menghadapi hambatan karena terbatasnya fasilitas yang diperuntukkan khusus bagi PDBK yang disediakan oleh lembaga pendidikan. Secara faktual, upaya mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam hal aksesibilitas, yang tercermin dari kekurangan jumlah Guru Pendidikan Khusus (GPK) karena sulitnya mencari lulusan S1 dengan jurusan Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa, minimnya fasilitas pendukung yang dapat dilihat masih banyak sekolah yang belum menyediakan sarana dan prasarana yang layak, ketidaksesuaian kurikulum yang diajarkan kepada PDBK dikarenakan tidak dilakukan modifikasi, dan masih adanya tindakan diskriminasi terhadap PDBK.

Permasalahan di atas juga ditemukan pada saat melakukan observasi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di wilayah Kota Tangerang, faktanya sekolah masih kesulitan untuk melakukan modifikasi pembelajaran hal ini dapat dilihat dari tingkat kesulitan pembelajaran yang masih disamakan atau banyak guru reguler yang belum memahami bagaimana cara melakukan modifikasi pembelajaran yang dikhususkan untuk PDBK, hanya nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang direndahkan dibandingkan peserta didik reguler. Terdapat sekolah yang tidak memiliki ruang sumber untuk PDBK bahkan salah satu sekolah menggabungkan ruang sumber dengan sekolah lain dikarenakan kekurangan fasilitas, hal ini membuat PDBK merasa tidak nyaman karena keterbatasan ruangan dan fasilitas yang digunakan saat belajar di ruang sumber. Ditemukan pula guru reguler yang mengajar di kelas terlihat tidak peduli terhadap PDBK yang sedang berlarian di kelas sehingga membuat kelas menjadi tidak kondusif, dikarenakan beberapa guru tidak memahami berbagai karakteristik yang dimiliki PDBK sehingga guru reguler terkesan tidak peduli. PDBK mengalami kesulitan untuk bersosialisasi dengan peserta didik reguler

karena peserta didik reguler takut dipukul ketika PDBK sedang tantrum, masalah ini berdampak lebih serius karena PDBK mendapatkan *bullying* dikarenakan PDBK seringkali dianggap berbeda. Padahal, seharusnya pendidikan inklusif menjadi sebuah solusi untuk mengatasi diskriminasi dalam bidang pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga pendidikan inklusif harus dijalankan dengan baik agar mengakomodasi layanan pendidikan yang layak bagi setiap anak.

Dilihat dari fakta yang ditemukan di lapangan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Raafinda Nur Afifa dan Ari Subowo tentang implementasi Program Pendidikan Inklusif Di Provinsi DKI Jakarta (Studi Di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi)<sup>1</sup> bahwa untuk mengetahui apakah kebijakan pendidikan inklusif berjalan dengan baik maka diperlukan untuk membahas tentang aspek kesiswaan, kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pendanaan dan lingkungan. Maka untuk mengetahui bagaimana penerapan layanan pendidikan inklusif di wilayah Kota Tangerang perlu dibahas terkait aspek – aspek seperti yang dijelaskan di atas.

Banyaknya permasalahan yang ditemukan pada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif khususnya di wilayah Kota Tangerang disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk itu diperlukan adanya peninjauan terhadap implementasi layanan pendidikan inklusif agar implementasi yang diterapkan tetap sesuai dengan kebijakan pendidikan inklusif yaitu dengan melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR WILAYAH KOTA TANGERANG (Penelitian Survei di Sekolah Dasar Wilayah Kota Tangerang)** karena dengan melakukan survei akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana penerapan kebijakan inklusif terhadap sekolah dasar di wilayah Kota Tangerang terlebih lagi dalam memperbaiki pendidikan inklusif di Kota Tangerang yang sudah menerapkan layanan pendidikan Inklusif sejak tahun 2021.

---

<sup>1</sup> Raafinda Nur Afifa and Ari Subowo, “Implementasi Program Pendidikan Inklusif Di Provinsi DKI Jakarta ( Studi Di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi ),” *Journal of Public Policy and Management Review* 9, no. 2 (2020): 348–65.

## **B. Rumusan dan Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas yang akan menjadi fokus penelitian adalah “Bagaimana implementasi layanan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar wilayah Kota Tangerang”, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kesiswaan di sekolah inklusif wilayah Kota Tangerang?
2. Bagaimana implementasi tenaga pendidik di sekolah inklusif wilayah Kota Tangerang?
3. Bagaimana implementasi kurikulum dan pembelajaran di sekolah inklusif wilayah Kota Tangerang?
4. Bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah inklusif wilayah Kota Tangerang?
5. Bagaimana implementasi keuangan di sekolah inklusif wilayah Kota Tangerang?
6. Bagaimana implementasi lingkungan di sekolah inklusif wilayah Kota Tangerang?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka penulis memberikan batasan dalam penelitian implementasi layanan pendidikan inklusif dapat dilihat dengan mengkaji aspek kesiswaan, kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pendanaan dan lingkungan di Sekolah Dasar yang mengimplementasikan layanan pendidikan inklusif wilayah Kota Tangerang.

## **D. Tujuan Umum Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi pendidikan inklusif yang berada di wilayah Kota Tangerang.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut :



## 1. Manfaat teoritis

Melalui survei implementasi layanan pendidikan inklusif di sekolah dasar wilayah Kota Tangerang maka dapat mengetahui sejauh mana kebijakan pendidikan inklusif telah diimplementasikan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Manfaat bagi mahasiswa

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana implementasi layanan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar di wilayah Kota Tangerang.

### b) Manfaat bagi kepala sekolah, guru dan siswa

Hasil penelitian survei dapat membantu kepala sekolah dalam mengidentifikasi kekurangan dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah. Untuk guru dapat menyusun pembelajaran yang disesuaikan dengan memahami kebutuhan dan preferensi siswa secara lebih baik. Untuk siswa hasil survei ini dapat digunakan untuk membentuk lingkungan belajar yang lebih inklusif dan ramah bagi semua siswa.

### c) Manfaat bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dengan mengidentifikasi hambatan dan tantangan konkret yang dihadapi oleh sekolah dasar dalam menerapkan layanan pendidikan inklusif.

*Intelligentia - Dignitas*